

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*. UU Nomor 37 Tahun 2008.
- _____. *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*. UU Nomor 25 Tahun 2009.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014.
- _____. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Kepemimpinan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003.

B. Buku

- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, 2005.
- Fachrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Isra, Saldi. *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, Sebuah Kumpulan Wawancara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Juliantara, Dadang. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Siahaan, Lintong Oloan. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Siaigan, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- Sinambela, Lijan Poltak. dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sirajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Situmorang, Victor, dkk. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sujata, Antonius dan Surahman. *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

C. Lain-lain

Assihiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945". *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 – 18 Juli 2003.

Desiana, Ayu. "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik". *Jurnal Inovatif*, Vol. 6 No. 2 (2013).

Gunawan. "Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh". *Jurnal Bina Praja*, Volume 4, No. 2 Juni 2012.

Hakim, Adhar. "Fungsi dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik". *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 7, April 2015.

Ombudsman RI. "Profil", <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfpp>. Diakses tanggal 5 Mei 2021.

Rakasiwi, Muh. Rachdian. "Tinjauan Hukum Kewenangan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Sendhikasari, Dewi. "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik". *Info Singkat*, Vol. IX, No. 03/I/Puslit/Februari/2017.

Suseno, Agung. "Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bisnis dan Birokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 17 Nomor 1 Januari-April.